



STRATEGI BAPPERIDA DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Paisal Rahmat ^a, Rahmad Hidayat Lubis ^{b*}, Reza Fansyuri ^c, Juni Khairani ^d, Aida Rahmi ^e, Eli Saharni ^f, NurAliyah ^g

^a Ekonomi Syariah; paisalrahmat@stain-madina.ac.id, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

^b Ekonomi Syariah; rahmadhidayatlubis8@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

^c Ekonomi Syariah; rezafansyuri37@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

^d Ekonomi Syariah; junihairani8@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

^e Ekonomi Syariah; aidarahmi56@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

^f Ekonomi Syariah; elisaharni@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

^g Ekonomi Syariah; Nuraliyahlubis105@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, SumateraUtara

* Penulis Korespondensi: Rahmad Hidayat Lubis

ABSTRACT

This study aims to examine Bapperida's strategy in promoting regional innovation in Mandailing Natal Regency. A qualitative approach with a case study design was used. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants, observation of innovation activities, and review of regional planning and policy documents such as the RPJMD and RKPD. The findings indicate that Bapperida plays a crucial role as a policy maker and coordinator in integrating innovation into regional development planning documents. In addition, Bapperida functions as a facilitator that encourages cross-sector collaboration, including with the tourism, health, and fisheries agencies, to expand the application of innovation. The implementation of the strategy is carried out through strengthening coordination, facilitating collaborative forums and capacity-building workshops, assisting regional apparatus, and providing funding support for pilot projects. However, the effectiveness of the strategy still faces obstacles in the form of limited human resources and budget, weak coordination between regional agencies, and a monitoring and evaluation system that is not yet optimal. Therefore, optimization efforts are needed through increasing human resource capacity, developing innovation guidelines and SOPs, integrating innovation into the RKPD, and developing incentive mechanisms and sustainable regional performance evaluations.

Keywords: *Bapperida; Strategy; Innovation; Development; Mandailing Natal.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi Bapperida dalam mendorong pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, observasi aktivitas inovasi, serta telaah dokumen perencanaan dan kebijakan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapperida berperan penting sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam mengintegrasikan inovasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Bapperida berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi lintas sektor, antara lain dengan dinas pariwisata, kesehatan, dan perikanan, untuk memperluas penerapan inovasi. Implementasi strategi

dilakukan melalui penguatan koordinasi, penyelenggaraan forum dan lokakarya kolaboratif, pendampingan perangkat daerah, serta dukungan pendanaan proyek percontohan. Meskipun demikian, efektivitas strategi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan pedoman dan SOP inovasi, integrasi inovasi dalam RKPD, serta pengembangan mekanisme insentif dan evaluasi kinerja daerah berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bapperida; Strategi; Inovasi; Pengembangan; Mandailing Natal.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan [1]. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan [2].

Inovasi daerah merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Inovasi daerah mencakup pembaruan dalam kebijakan, program, sistem, maupun metode kerja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah [3]. Melalui inovasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional [4].

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah sekaligus mendorong pengembangan inovasi daerah. Sebagai lembaga perencana, Bapperida berfungsi menyusun arah kebijakan pembangunan serta mengintegrasikan inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan [5]. Di Kabupaten Mandailing Natal, Bapperida berperan sebagai penggerak dalam pengembangan inovasi daerah melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Namun demikian, pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal [6]. Masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, serta perlunya penguatan sistem pendukung inovasi daerah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penerapan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah apabila tidak diiringi dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bapperida dalam mendorong pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian inovasi daerah serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan inovasi daerah yang lebih efektif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji strategi Bapperida dalam mendorong pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, observasi terhadap aktivitas terkait inovasi daerah, serta studi dokumentasi berupa dokumen perencanaan dan kebijakan daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan penerapan triangulasi untuk menjaga keabsahan data [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Kebijakan Strategis Bapperida dalam Pengembangan Inovasi Daerah

Bapperida memiliki peran sentral sebagai perumus arah dan kebijakan pembangunan yang menjembatani visi kepala daerah dengan implementasi teknis perangkat daerah. Dalam konteks pengembangan inovasi daerah, Bapperida berfungsi menentukan prioritas inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah, mengintegrasikan inovasi ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan RKPD, serta memastikan kebijakan inovasi selaras dengan target pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Peran ini menegaskan posisi Bapperida bukan sekadar perencana, tetapi juga sebagai fasilitator kebijakan yang mampu mengarahkan sumber daya daerah ke program inovatif [4].

Dari keterangan informan secara kebijakan, Bapperida merancang instrumen kebijakan yang mendorong lahirnya inovasi, antara lain pedoman penentuan ide inovasi, pembekalan pembuatan inovasi berupa (coaching klinik, sosialisasi, rapat, pertemuan, tinjauan lapangan dll). Penganggaran inovasi diperkuat dengan mekanisme pengusulan inovasi ke dalam aplikasi Bagas data dan Inovasi Madina (BAGINDA MADINA) untuk mengikuti lomba tingkat Kabupaten, selanjutnya mengikuti lomba tingkat provinsi, dan lomba tingkat nasional melalui aplikasi Innovative Government Award (IGA) dan evaluasi inovasi perangkat daerah, serta kebijakan insentif bagi inisiatif inovatif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memobilisasi sumber daya fiskal dan nonfiskal, memperjelas alur kordinasi antar-perangkat daerah, serta menciptakan ruang riset kebijakan yang terukur. Dengan adanya kebijakan formal, proses adopsi inovasi menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan sehingga potensi inovasi tidak hanya bersifat sporadis.

Bapperida menjalankan fungsi koordinasi lintas sektoral untuk memastikan integrasi inovasi dalam program-program teknis perangkat daerah dan sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal (universitas, LSM, pelaku usaha, dan masyarakat). Pendekatan kolaboratif tersebut penting untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan mempercepat transfer inovasi dari tahap uji coba ke skala program daerah [4].



Gambar 1. Rapat Koordinasi dengan lintas Sektoral terkait pengembangan Inovasi daerah di Kab. Mandailing Natal 2025.

Sumber: Bapperida Mandailing Natal

Meski demikian, efektivitas peran dan kebijakan strategis Bapperida membutuhkan dukungan kapasitas teknis, sistem informasi inovasi yang andal, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas. Penguatan sumber daya manusia Bapperida, penyediaan anggaran khusus untuk inovasi, dan penyusunan indikator kinerja inovasi menjadi pra-syarat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan kapasitas perencanaan inovasi, pengembangan SOP pengelolaan inovasi, serta pembentukan skema insentif dan evaluasi berbasis hasil untuk mendorong kontinuitas inovasi daerah [4].

3.2 Implementasi Strategi Bapperida dalam Pengembangan Inovasi Daerah

Implementasi strategi Bapperida dalam pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Bapperida berperan sebagai koordinator perencanaan dan pengarah kebijakan inovasi, sementara dinas-dinas teknis berfungsi sebagai pelaksana inovasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pola kerja ini bertujuan agar

inovasi yang dikembangkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan daerah.

Salah satu bentuk nyata implementasi strategi pengembangan inovasi daerah terlihat dari keberhasilan beberapa perangkat daerah dalam meraih prestasi pada Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025. Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal berhasil meraih Juara 1 Umum Kategori perangkat daerah melalui inovasi SIMPADE MADINA V2 (Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal). Inovasi ini merupakan penguatan sistem digitalisasi pendapatan daerah yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta optimalisasi penerimaan daerah. Implementasi inovasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang modern, akuntabel, dan berbasis teknologi [8].

Selain itu, pada kategori pendidikan, UPTD SMP Negeri 1 Ranto Baek meraih Juara 1 melalui inovasi FITA MENAGIS HISTERIS (Inovasi Fiqih Tahfiz Meningkatkan Strategis High Pendaftar Siswa Baru Secara Drastis) yang menjadi strategi unggulan dalam meningkatkan daya saing sekolah. Program ini mengintegrasikan pembelajaran fiqih, tahfiz, tahkim, hingga praktik fardhu kifayah seperti memandikan jenazah. Implementasi program tersebut mampu menarik perhatian masyarakat, khususnya orang tua siswa, sehingga terjadi peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan pada tahun ajaran baru. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis nilai keagamaan dan kebutuhan sosial masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan mutu dan eksistensi lembaga pendidikan daerah.



Gambar 2. Acara Pengumuman Lomba Inovasi Daerah Kab. Mandailing Natal Tahun 2025.

Sumber: Bapperida Mandailing Natal

Selain sektor tersebut, Bapperida juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan dan dinas perikanan dalam mendorong inovasi pelayanan dan pengelolaan sumber daya. Pada sektor kesehatan, inovasi difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan pada sektor perikanan inovasi diarahkan pada penguatan produktivitas, pengelolaan hasil perikanan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa inovasi daerah dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor.

Secara keseluruhan, implementasi strategi Bapperida dalam pengembangan inovasi daerah menunjukkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi masih memerlukan penguatan koordinasi, kejelasan pembagian peran, serta dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, Bapperida perlu terus memperkuat mekanisme kerja sama lintas sektor agar inovasi daerah dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal.

3.3 Tantangan dan Upaya Optimalisasi Pengembangan Inovasi Daerah

Informan juga mengatakan Pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu tantangan

utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran. Tidak semua perangkat daerah memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terkait pengembangan inovasi, sehingga inovasi yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan demikian juga dengan dukungan ketersediaan anggaran, bahwa selama ini OPD dalam menginisiasi inovasinya masih dengan cara inisiatif swadaya tanpa adanya anggaran yang tersedia.

Selain keterbatasan sumber daya, tantangan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Inovasi daerah sering kali masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih program, rendahnya efektivitas inovasi, serta belum maksimalnya dampak inovasi terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah [9].

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapperida melakukan berbagai upaya optimalisasi pengembangan inovasi daerah melalui penguatan peran koordinatif dan fasilitatif. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dalam perumusan inovasi, serta mengintegrasikan inovasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini bertujuan agar inovasi yang dikembangkan memiliki arah yang jelas dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah [10].

Bapperida juga berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan inovasi daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan sistem pendukung inovasi. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyusunan pedoman inovasi daerah. Dengan adanya upaya optimalisasi tersebut, diharapkan pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah [4].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Bapperida memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Mandailing Natal melalui fungsi perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan fasilitasi integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Implementasi strategi dilakukan melalui penguatan koordinasi, forum kolaboratif, pendampingan perangkat daerah, serta dukungan terhadap proyek percontohan dan partisipasi dalam lomba inovasi. Keberhasilan beberapa perangkat daerah dalam meraih prestasi inovasi menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, efektivitas pengembangan inovasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pendukung inovasi agar pengembangan inovasi daerah dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Bapperida Kabupaten Mandailing Natal meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta menyediakan alokasi anggaran khusus inovasi dalam perencanaan daerah. Selain itu, perlu disusun pedoman dan SOP pengelolaan inovasi yang lebih terstruktur, memperkuat integrasi inovasi dalam RKPD, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur. Pengembangan mekanisme insentif bagi perangkat daerah yang inovatif dan penguatan kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, serta masyarakat juga perlu ditingkatkan agar inovasi daerah tidak bersifat sementara, melainkan menjadi budaya kerja yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mandailing Natal.

4.3 Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapperida Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang diajukan. Penulis juga mengapresiasi bantuan, data, serta kesediaan pihak Bapperida dalam memberikan informasi dan wawancara selama proses penelitian berlangsung. Dukungan tersebut sangat membantu dalam kelancaran penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Lestari, P. A. Pasha, M. Oktapianti, and H. Noviarita, "Teori Pembangunan Ekonomi," *REVENUE J. Manaj. Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.24042/revenue.v2i2.9071.
- [2] S. Suhardi and P. Panjaitan, "Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional," *J. Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekon.*, vol. 3, no. 1, 2025, doi: 10.59971/jimbe.v3i1.393.
- [3] T. Efendi and A. Frinaldi, "Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik," *Futur. Acad. J. Multidiscip. Res. Sci. Adv.*, vol. 2, no. 4, 2024, doi: 10.61579/future.v2i4.271.
- [4] Y. D. Ratnasar and S. Wahyutari, "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo dalam Penentuan Prioritas Hasil Usulan Musrenbang di Tingkat Kecamatan," *Discov. J. Ilmu Pengetah.*, vol. 10, no. 2, 2025, doi: 10.33752/discovery.v10i2.10459.
- [5] R. W. Ningtyas and I. S. D. Jayanti, "Implementasi Prinsip Utama Good Governance pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bapperida Kabupaten Sragen," *J. Adm. Kant.*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: 10.51211/jak.v13i1.3485.
- [6] R. H. Lubis *et al.*, "Tradisi Marsipulut Sebagai Simbol Budaya dalam Prosesi Marpokat pada tahapan Pra-Perkawianan di Desa Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal," *J. Ilm. Multidisiplin Ilmu /*, vol. 2, no. 5, 2025, doi: 10.69714/vpaxtg49.
- [7] Sugiyono, *Metode Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [8] R. F. Munawar and A. Apriyansa, "ANALISIS WEBSITE RIDA BAPPERIDA: MENINGKATKAN AKSES INFORMASI PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL," *Triwikrama J. Ilmu Sos.*, vol. 8, no. 7, 2025, doi: 10.9963/whmg3x13.
- [9] M. Wijaya, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- [10] A. F. Hidayat, "Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya," *J. Syntax Imp. J. Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 4, no. 6, 2024, doi: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.357.